

INTISARI

Penelitian ini menganalisis peran aktivisme digital fandom K-Pop dalam proses *agenda setting* kebijakan publik, dengan fokus pada kasus penolakan Undang-Undang Omnibus Law di media sosial X/Twitter. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada dampak di level makro, penelitian ini berfokus pada strategi taktis di level mikro yang digunakan oleh fandom K-Pop dalam mendorong, membingkai, dan mempertahankan isu kebijakan di agenda publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *content analysis* melalui pendekatan studi kasus terhadap unggahan media sosial yang memanfaatkan elemen budaya K-Pop. Untuk memperkaya dan memvalidasi data yang ditemukan melalui analisis konten, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan dalam aktivisme digital fandom K-Pop adalah penggunaan *hashtag* dalam mobilisasi isu, produksi konten kreatif sebagai alat advokasi digital, dan partisipasi publik melalui petisi. Strategi ini membantu fandom K-Pop dalam melaksanakan perannya sebagai aktor non-tradisional yang signifikan dalam dinamika *agenda setting*, terutama melalui pembentukan *national mood*, tekanan kelompok kepentingan berbasis digital, serta pengaruh terhadap konfigurasi kekuatan politik di ruang digital. Aktivisme digital yang dilakukan oleh fandom K-Pop nyatanya tidak hanya memperluas aktor dan kanal *agenda setting* kebijakan, tetapi juga mampu menjaga presistensi isu penolakan UU Omnibus Law dalam agenda publik melalui praktik *kpopfication* yang adaptif dan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran bentuk tekanan politik, dari yang bersifat institusional menuju pola partisipatif yang dimediasi oleh budaya populer dan platform digital.

Kata Kunci: *Aktivisme Digital, Fandom K-Pop, Agenda Setting Kebijakan, Budaya Populer, Media Sosial*

ABSTRACT

This study analyzes the role of K-Pop fandom digital activism in the public policy agenda-setting process, focusing on the resistance against the Omnibus Law on the social media platform X (formerly Twitter). Diverging from previous research that generally emphasizes macro-level impacts, this study focuses on micro-level strategies employed by K-Pop fandoms to promote, frame, and sustain policy issues within the public agenda. Using a qualitative approach, this research utilizes content analysis through a case study of social media posts that leverage K-Pop cultural elements. To enrich and validate the findings from the content analysis, interviews also conducted with several informants. The result indicate that the strategies employed in K-Pop fandom digital activism include the use of hashtag for issue mobilization, the production of creative content as a digital advocacy tool, and public participation through petitions. These strategies enable K-Pop fandoms to perform their roles as significant non-traditional actors in agenda-setting dynamics, specifically through the formation of ‘national mood’, digital-based interest group pressure, and influence over the configuration of political power in digital spaces. K-Pop fandom digital activism not only expands the actors and channels of policy agenda-setting but also maintains the persistence of the Omnibus Law resistance within the public agenda through adaptive and sustainable “kpopfication” practices. These findings indicate a shift in political pressure from institutional forms toward participatory patterns mediated by popular culture and digital platforms.

Keywords: *Digital Activism, K-Pop Fandom, Policy Agenda-Setting, Popular Culture, Social Media.*